

BAB I

Pendahuluan

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

LKj Biro Umum Tahun 2022 ini disusun dengan maksud memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Biro Umum, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian Biro Umum selama satu periode. Selain itu, juga sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Biro Umum untuk meningkatkan kinerjanya kedepan.

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Biro Umum berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Tugas pokok Biro Umum berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah adalah “membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Rumah Tangga, Administrasi Keuangan dan Aset dan Tata Usaha”.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Biro Umum melaksanakan fungsi:

1. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Rumah Tangga, Administrasi Keuangan dan Aset dan Tata Usaha
2. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Rumah Tangga, Administrasi Keuangan dan Aset dan Tata Usaha; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Tata Usaha Biro, Persuratan dan Arsip Sekretariat Daerah dan Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Kendaraan, Persuratan dan Arsip dan Tata Usaha Biro, Pimpinan dan Staf Ahli;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Pengelolaan Kendaraan, Persuratan dan Arsip dan Tata Usaha Biro, Pimpinan dan Staf Ahli; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset

Bagian Administrasi Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penatausahaan Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah, Akuntansi dan Penatausahaan Aset dan Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bagian Administrasi Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Penatausahaan Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah, Akuntansi dan Penatausahaan Aset dan Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penatausahaan Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah, Akuntansi dan Penatausahaan Aset dan Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Bagian Rumah Tangga

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Urusan Rumah Tangga Gubernur, Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur dan Urusan Dalam.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bagian Rumah Tangga mempunyai fungsi :

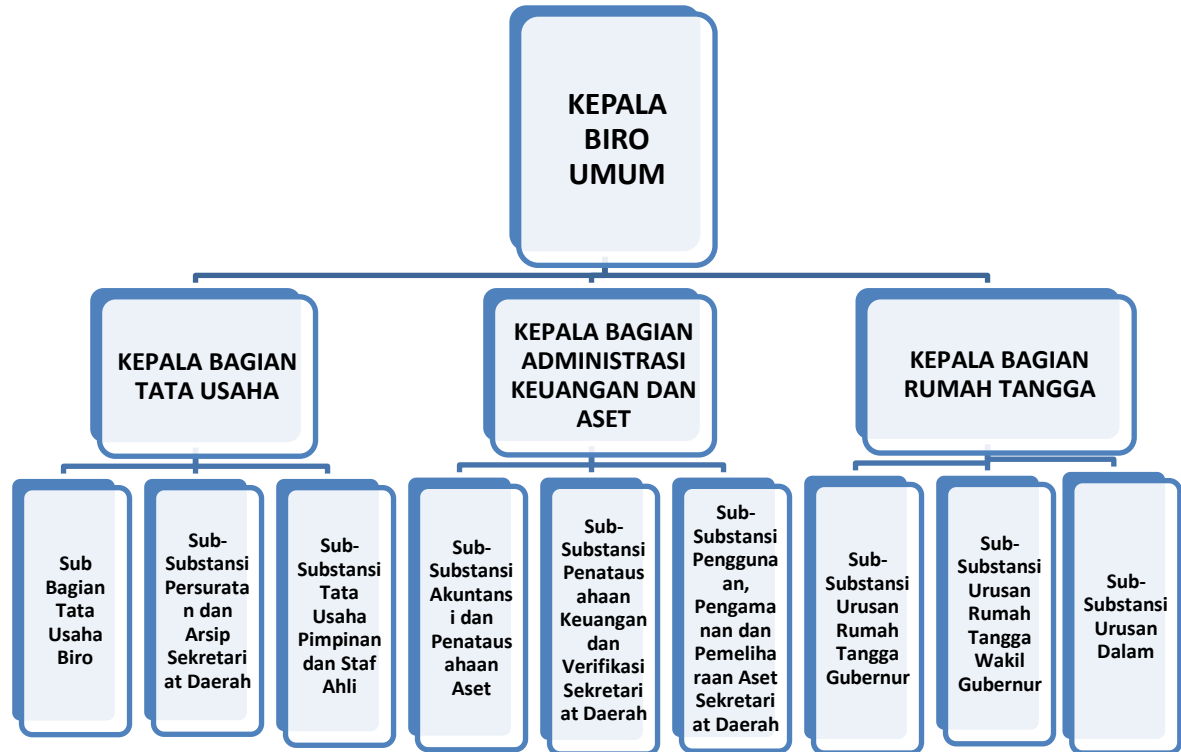
- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Urusan Rumah Tangga Gubernur, Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur dan Urusan Dalam;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Urusan Rumah Tangga Gubernur, Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur dan Urusan Dalam; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka susunan struktur organisasi Biro Umum yang dipimpin oleh Kepala Biro Umum terdiri dari 3 Bagian yang masing – masingnya dipimpin oleh Kepala Bagian, 1 Sub Bagian yang dipimpin

oleh Kepala Sub Bagian dan 8 Kelompok Jabatan Fungsional dapat dilihat pada grafik berikut ini:

GRAFIK 1
STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BIRO UMUM SETDA PROV. SUMBAR



1.4. Personil, Sarana dan Prasarana, Keuangan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan Biro Umum didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 225 dengan rincian 73 orang ASN dan 152 orang non ASN orang seperti yang terlihat pada tabel di bawah. Sebagai supporting unit tentu diperlukan SDM yang berkompentensi dan memiliki skil tertentu dalam menjalankan tugas-tugas Biro Umum. Biro Umum saat ini memiliki persentase pegawai ASN dengan jenjang pendidikan Sarjana/D-IV ke atas sebesar 42,47 persen (31 orang) dari total pegawai Biro Umum. Komposisi pegawai Biro Umum dapat disajikan pada tabel-tabel berikut :

TABEL 1.4.1

JUMLAH SDM (PNS) BERDASARKAN PENDIDIKAN

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S3	-
2	S2	9 Orang
3	S1	20 Orang
4	D3	2 Orang
5	SMA	40 Orang
6	SMP	2 Orang
7	SD	-

Sumber : Daftar Nominatif Pegawai Biro Umum 2022

TABEL 1.4.2

JUMLAH SDM BERDASARKAN JENIS KEPEGAWAIAN

No.	Jenis	Jumlah
1	PNS	73 Orang
2	CPNS	-
3	PTT	4 Orang
4	Tenaga Kontrak	148 Orang

Sumber : Daftar Nominatif Pegawai Biro Umum Tahun 2022

TABEL 1.4.3
JUMLAH SDM (PNS) BERDASARKAN GOLONGAN

No.	Golongan	Jumlah
1	IV	6 Orang
2	III	35 Orang
3	II	31 Orang
4	I	1 Orang

Sumber : Daftar Nominatif Pegawai Biro Umum Tahun 2022

SARANA DAN PRASARANA

Secara umum kondisi eksisting sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pada Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

TABEL 1.4.4
JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PADA BIRO UMUM

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah	Kondisi
1	Alat-alat Besar	41	Baik
2	Alat-alat Angkutan	111	100 Unit Baik dan 11 Unit Rusak Ringan
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	16	Baik
4	Alat Pertanian	20	Baik
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.176	Baik
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	219	Baik
7	Alat-alat Kedokteran	17	Baik
8	Alat Laboratorium	27	16 Unit Baik dan 11 Unit Rusak Ringan
9	Bangunan Gedung	27	25 Unit Baik dan 2 Unit Rusak Ringan

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah	Kondisi
10	Monumen	1	Baik
11	Buku Perpustakaan	34	Baik
12	Barang Bercorak Kebudayaan	57	Baik

Sumber : Buku Inventaris Biro Umum Tahun 2022

KEUANGAN

Anggaran untuk menunjang program dan kegiatan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2022 bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat TA. 2022 ini berjumlah Rp.108.021.880.615 setelah perubahan. Dengan Total Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan KDH/WKDH sebesar Rp.48.079.991.973 dan Belanja Penunjang Urusan Lainnya sebesar Rp.59.941.888.642.

1.5. Isu-Isu Strategis

Mencermati permasalahan dan telaahan terhadap tugas pokok dan fungsi, maka dirumuskan beberapa isu strategis yang terkait, antara lain:

1. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik menjadi fokus perhatian pemerintah daerah saat ini karena besarnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Dalam hal ini, Biro Umum memiliki peran yang strategis dalam memberikan atau memfasilitasi kegiatan Pimpinan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Sejalan dengan misi Gubernur Sumatera Barat pada periode RPJMD ke-IV (2021-2026) Biro Umum salah satu OPD yang mengampu pada Misi ke 7 yaitu Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas dengan tujuan meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani pada sasaran ke tiga yaitu meningkatnya kualitas pelayanan public, maka Biro Umum memiliki peran strategis sebagai yang terdepan dalam:
 - a. Terdepan dalam memberikan pelayanan kepada tamu Pimpinan, pelayanan kepada pimpinan dan pelayanan administrasi keuangan setda.

Untuk itu perlu menyikapinya dengan melakukan penguatan kapasitas SDM Biro Umum, sarana dan prasarana.

- b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Biro Umum BB (70)
- c. Salah satu OPD yang memiliki target pendapatan dalam bidang penerimaan retribusi daerah pemakaian kekayaan daerah.

TANTANGAN DAN PELUANG

Tantangan dan peluang merupakan faktor eksternal yang akan mempengaruhi organisasi dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapainya. Biro Umum sebagai unit pendukung pelayanan pimpinan dan kesekretariatan kedepannya akan menghadapi tantangan yang cukup berat dalam memberikan dukungan terhadap kesuksesan tugas-tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah, dimana intensitas kunjungan kerja Pimpinan semakin tinggi dan intensitas kunjungan tamu yang juga semakin tinggi dan sulit diprediksi, perubahan regulasi di bidang tata Kelola keuangan dan tuntutan agar selalu berinovasi terutama dalam hal peningkatan pendapatan retribusi daerah. Semakin tingginya intensitas pekerjaan yang dihadapi akan tetapi struktur organisasi justru mengecil, seolah menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, tantangan juga akan datang dari aspek pelayanan publik yang semakin menuntut standar pelayanan prima. Sehingga faktor kualitas SDM, Sarana dan Prasarana menjadi dua aspek yang harus diperhatikan.

Berperan sebagai supporting unit Pelayanan Tamu, Pelayanan Pimpinan, Pelayanan Administrasi Keuangan Setda, Peningkatan Pendapatan Daerah Biro Umum turut mengembangkan inovasi di bidang pelayanan publik, diantaranya adalah peminjaman fasilitas gedung, ruang rapat, kendaraan dinas dan ruang teleconference yang dapat diajukan permohonannya secara online. Pengembangan pelayanan fasilitas ini dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah (PAD). Selain itu, inovasi pada pelayanan e-arsip dalam hal pencatatan dan pengarsipan surat masuk dan keluar melalui <http://arsip.biroumum.sumbarprov.go.id/> , penomoran SPT dan SPPD lingkup setda melalui

<http://sispensu.biroumum.sumbarprov.go.id/> , dan kedepannya Biro Umum akan mengembangkan system yang bekerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik yang berorientasi pada pencatatan pemeliharaan dan rehabilitasi Barang Milik Daerah.

Peluang pengembangan pelayanan Pimpinan oleh Biro Umum dapat berupa: pertama, revitalisasi fasilitas ruang rapat dan sejenisnya. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan pelayanan pimpinan dalam melaksanakan pertemuan dengan Perangkat Daerah dan instansi lainnya di daerah, yang menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi setiap bulannya.

Hambatan yang dihadapi oleh Biro Umum dalam pengembangan pelayanan ini datang dari aspek SDM yang masih kurang dari segi kualitas dan kuantitasnya. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat penerapan budaya kerja seperti belum terlihatnya pelayanan yang ramah dari aparaturnya serta belum maksimalnya rancangan dan implementasi prosedur pelayanan tamu pelayanan pimpinan dan pelayanan administrasi keuangan setda. Selain itu hambatan datang dari sarana prasarana yang ada dirasa masih kurang sehingga kualitas pelayanan dianggap masih kurang.

Dari uraian di atas, maka peta strategi dan scope kebijakan Biro Umum kedepannya dapat difokuskan kepada Pertama, Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH, Pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Setda; Kedua, Terwujudnya Tata Kelola Organisasi; dan Ketiga Peningkatan Pencapaian Target Retribusi Sedangkan kebijakan-kebijakan administrasi umum lainnya merupakan upaya Biro Umum sebagai lini pendukung kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan rekomendasi dan catatan strategis dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2022 yaitu:

1. Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana melalui pengadaan barang dan jasa dan pemeliharaan sarpras yang dapat mendukung pelayanan Biro Umum, utamanya fasilitas pada beberapa gedung/asset yang dikelola serta sarana dan prasarana untuk kebutuhan Pimpinan.

2. Meningkatkan daya dukung personil melalui rekrutmen tenaga khusus yang dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan pelayanan Biro Umum.
3. Meningkatkan dukungan teknologi pada pelayanan Biro Umum seperti e-arsip, sispensu, sipintas, dan lain-lain.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Biro Umum pada 5 (lima) layanan unggulan Biro Umum, yaitu Pelayanan Ruang Pertemuan, Pelayanan Tamu/Pimpinan, Pelayanan Peminjaman Kendaraan dan Fasilitas Kedinasan, Pelayanan Penerimaan dan Pendistribusian Surat, dan Pelayanan Administrasi Keuangan Setda.

1.6. Sistematika Laporan Kinerja

Laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
- Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- Bab II Perencanaan Kinerja
- Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- Perjanjian Kinerja Tahun 2022
 - Revisi Pohon Kinerja Tahun 2022
- Bab III Akuntabilitas Kinerja
- Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja
 - Hasil Pengukuran Kinerja
 - Capaian Kinerja SKPD
 - Realisasi Anggaran
- Bab IV Penutup
- Lampiran

BAB II

Perencanaan Kinerja

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja diatur menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan demikian, dapat terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dan menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam merencanakan perjanjian kinerja, agar terukur dan dapat pula mencapai tujuan organisasi, maka indikator yang dijadikan instrumen untuk mengukur kinerja, dijabarkan dari Sasaran Strategis yang telah sesuai (sinkron) dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Biro Umum.

Pada Tahun 2022, Biro Umum memiliki 5 (Lima) indikator kinerja yang semuanya ditetapkan menjadi IKU. Indikator tersebut merupakan alat ukur tercapainya 3 (Tiga) Sasaran Strategis Biro Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Biro Umum 2021-2026.

Agar perencanaan kinerja organisasi semakin baik perlu dilakukan pembenahan terhadap manajemen kinerja. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyusun perjanjian kinerja pejabat secara hierarkis atau leveling, mulai dari Kepala SKPD pada level Eselon II, Kepala Bagian pada level Eselon

III, dan Kepala Sub Bagian pada level Eselon IV, Kelompok Jabatan Fungsional serta masing-masing Staf Pelaksana pada level terendah. Penyusunan struktur kinerja bertingkat ini mestilah selaras dan tersambung antar level dan indikator yang ditetapkan juga mesti memenuhi kriteria SMART.

Selanjutnya penyusunan indikator kinerja pada masing-masing level juga memperhatikan ketersediaan basis data, mekanisme pengumpulan data dan pengolahan data yang tervalidasi atau dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melakukan penilaian kinerja dengan cara membandingkan realisasi capaian dengan target indikator kinerja, menunjukkan tingkat pencapaian kinerja. Namun pada penilaian LKj secara keseluruhan, perencanaan kinerja yang sesuai kriteria menjadi porsi penilaian yang cukup besar. Oleh karenanya penting sekali untuk menyusun perencanaan kinerja yang memenuhi kriteria SMART.

TABEL 2.1.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Meningkatnya Kepuasan Stakeholders Dibidang Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH, Pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	88,50 (Sangat Baik)
	IKM Pelayanan Pimpinan	88,50 (Sangat Baik)
	IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	88,50 (Sangat Baik)
Terwujudnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	70 (BB)
Meningkatnya pencapaian Target Retribusi	% realisasi penerimaan retribusi	95%

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Total anggaran Perjanjian Kinerja 2022 ini berasal dari anggaran Belanja Biro Umum TA. 2022 sebesar Rp.108.021.880.615,-.

Dengan demikian, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Anggaran yang digunakan pada pengukuran Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 ini dapat dilihat pada Tabel 2.1.2 berikut ini :

TABEL 2.1.2

PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA BIRO UMUM TA 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Meningkatnya Kepuasan Stakeholders dibidang Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH, Pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	Sangat Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah • Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 	91.669.745.351
	IKM Pelayanan Pimpinan	Sangat Baik		
	IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	Sangat Baik		
Terwujudnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	24.470.873.663

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Meningkatnya pencapaian Target Retribusi	% realisasi penerimaan retribusi	95%	<ul style="list-style-type: none"> Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 	89.592.000
JUMLAH				108.021.880.615

Sumber : DPA Perubahan Biro Umum Tahun 2022

2.2 Revisi Pohon Kinerja (Cascading) Tahun 2022

Sehubungan dengan penyempurnaan SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melalui asistensi dengan Tim Pakar dari Kementerian PAN dan RB, telah dilakukan evaluasi terhadap pohon kinerja (cascading) Perangkat Daerah. Evaluasi ini menghasilkan perbaikan pada struktur pohon kinerja Biro Umum Tahun 2022 ini, yakni menyelaraskan Tujuan Strategis dengan Sasaran Strategis. Sekaligus mempertajam hubungan keterkaitan antara pencapaian Tujuan (Impact) dengan pencapaian Sasaran (Outcomes) yang dirasa masih kurang tepat.

Pada Pohon Kinerja Biro Umum sebelum direvisi, terdapat 2 (dua) Tujuan Strategis yaitu "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" dan "Meningkatnya Kinerja Organisasi" dengan 4 (empat) sasaran strategis

Sedangkan pada Pohon Kinerja setelah direvisi, terdapat 3 (tiga) Tujuan Strategis yaitu "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Meningkatkan Organisasi yang Akuntabel dan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Perangkat Daerah" dengan 5 (lima) Sasaran Strategis

Pohon Kinerja (Cascading) Biro Umum pada Tahun 2022 setelah direvisi dapat dilihat pada grafik 2.2.1 berikut ini :

GRAFIK 2
POHON KINERJA (CASCADING) BIRO UMUM TAHUN 2022

**PERANGKAT DAERAH
IMPACT**

Tujuan 1 :
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
IKT : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Biro Umum

ESSELON II OUTCOMES

Sasaran Strategis 1 :
Meningkatnya Kepuasan Stakeholders di Bidang Pelayanan Tamu, Pimpinan dan Administrasi Keuangan Setda
IKU : 1. IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH
2. IKM Pelayanan Pimpinan
3. IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda

**ESSELON III
INTERMEDIATE
OUTCOMES**

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH
IK : 1. Persentase Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH yang Terfasilitasi
2. Realisasi Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan
IK : 1. Persentase Surat Menyurat Pimpinan yang Terfasilitasi
2. Persentase Acara yang Terfasilitasi pada Gedung Kantor
3. Persentase Kebersihan dan Keamanan Kantor yang Terfasilitasi

Meningkatnya Kualitas Pengadaan dan Pemeliharaan BMD
IK : 1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarpras Pendukung Kinerja
2. Persentase BMD dalam Kondisi Baik

Meningkatnya Kualitas Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan
IK : 1. Persentase Pengurangan Kesalahan Hasil Verifikasi Keuangan
2. Persentase SPJ Pertanggungjawaban Bendahara yang Disahkan
3. Penyampaian Dokumen Pelaporan Keuangan Tepat Waktu

Meningkatnya Pengawasan Keuangan Internal Organisasi
IK : 1. Persentase Temuan Pemeriksaan Keuangan yang Ditindaklanjuti

**ESSELON IV
OUTPUT**

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH
IK : 1. Jumlah acara yang terfasilitasi di Auditorium
2. Jumlah acara/kegiatan KDH/WKDH yang terfasilitasi
3. Jumlah agenda/audiensi tamu KDH/WKDH yang terfasilitasi

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pimpinan
IK : 1. Jumlah Surat Menyurat Pimpinan yang Terfasilitasi
2. Jumlah acara yang terfasilitasi di Istana Bung Hatta, Mess Bukit Lampu dan Aula Kantor Gubernur

Meningkatnya BMD yang Diadakan dan Dipelihara
IK : 1. Jumlah Aset yang Diadakan
2. Jumlah Aset yang Dipelihara

Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Keuangan
IK : 1. Jumlah SPJ Pengesahannya Biro-Biro Lingkup Setda yang Diverifikasi
2. Jumlah SPP dan SPM UP/GU/TU/LS Lingkup Setda yang Diverifikasi

Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan
IK : 1. Jumlah Temuan Pemeriksaan Keuangan yang Ditindaklanjuti

Meningkatkan Pengelolaan Kebersihan dan Keamanan Kantor
IK : 1. Jasa Kebersihan dan Keamanan yang dibayarkan honorinya

Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan
IK : 1. Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun Biro Umum yang Disusun
2. Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun Sekretariat Daerah yang Disusun

LAPORAN KINERJA 2022

PERANGKAT DAERAH IMPACT

Tujuan 2 :
Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel
IKT : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Biro Umum

ESSELON II OUTCOMES

Sasaran Strategis 1 :
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
IKU : 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Umum

ESSELON III INTERMEDIATE OUTCOMES

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Organisasi
IK : Nilai Komponen Perencanaan pada Evaluasi SAKIP

Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Organisasi
IK : Nilai Komponen Pelaporan pada Evaluasi SAKIP

Meningkatnya Pengawasan Internal Organisasi
IK : Nilai Komponen Evaluasi Internal pada Evaluasi SAKIP

Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Data Umum dan Kepegawaian
IK : 1. Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Sesuai SOP
2. Persentase Pegawai yang Penempatannya Sesuai Peta Jabatan

Meningkatnya Perencanaan, Pengamanan dan Penatausahaan BMD
IK : 1. Persentase BMD yang diasuransikan
2. Persentase Dokumen Perencanaan dan Penatausahaan BMD yang disusun Tepat Waktu

ESSELON IV OUTPUT

Tersusunnya Dokumen Perangkat Daerah Tepat Waktu
IK : Jumlah Dokumen Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu

Tersusunnya Dokumen Pelaporan Organisasi Tepat Waktu
IK : Jumlah Dokumen Pelaporan Organisasi yang Disusun Tepat Waktu

Meningkatnya ASN yang Mengisi LHKPN/LHKASN Tepat Waktu
IK : Jumlah ASN yang Mengisi LHKPN/LHKASN Tepat Waktu

Tersusunnya Dokumen SOP dan Fasilitas Persuratan
IK : 1. Dokumen SOP yang Sesuai Regulasi
2. Jumlah naskah dinas yang dilayani dengan SiMiraSimpel

Meningkatnya Pengamanan BMD sesuai Regulasi
IK : 1. Jumlah Aset yang Diinventaris
2. Persentase Data Aset yang Sudah direkon
3. Jumlah Aset yang Diasuransikan

Meningkatnya Implementasi Dokumen Perangkat Daerah
IK : Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Penganggaran

Meningkatkan Pemanfaatan Laporan terhadap Perencanaan Perangkat Daerah
IK : Persentase Hasil Evaluasi / Reviu yang Ditindaklanjuti dalam Dokumen Perangkat Daerah

Ketersediaan Data Kepegawaian, Dokumen ANJAB dan Peta Jabatan sesuai Regulasi
IK : 1. Dokumen ANJAB dan Peta Jabatan yang Sesuai Regulasi
2. Persentase Ketersediaan Data Pegawai

Meningkatnya Perencanaan dan Penatausahaan BMD
IK : 1. Persentase BMD yang Terakomodir dalam RKBMD dan RKPBM
2. Laporan Penatausahaan Aset yang Disusun
3. Jumlah Aset yang tidak Bermanfaat yang Sudah Dihapuskan

PERANGKAT DAERAH
IMPACT

Tujuan 3 :
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
IKT : Persentase Peningkatan PAD

ESSELON II OUTCOMES

Sasaran Strategis 1 :
Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi
IKU : % Realisasi Penerimaan Retribusi

ESSELON III
INTERMEDIATE
OUTCOMES

Meningkatnya Realisasi Retribusi
IK : 1. Nilai Realisasi Retribusi

ESSELON IV
OUTPUT

Meningkatnya optimalisasi penerimaan retribusi
IK : 1. Jumlah STS Retribusi Daerah yang dilaporkan Tepat Waktu

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Pengukuran terhadap capaian target kinerja atau kelompok indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Umum Tahun 2022 dilakukan guna melihat sejauhmana tercapainya tujuan strategis organisasi. Metodologi pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Agar pengukuran kinerja secara sederhana ini dapat terjamin validitasnya maka perlu diuraikan metodologi pengukuran yang digunakan. Sebelumnya, agar kinerja organisasi dapat dikatakan berhasil atau gagal, maka perlu ditetapkan klasifikasi penilaian dengan mengelompokkan besaran persentase capaiannya dengan predikat gagal sampai dengan sangat baik, seperti yang dapat dilihat pada Tabel-tabel berikut ini :

TABEL 3.1.1.
KRITERIA PENILAIAN CAPAIAN KINERJA SURVEY KEPUASAN
MASYARAKAT

NO.	INTERVAL NILAI	KINERJA PELAYANAN
1	25,00 – 64,99	Tidak Baik
2	65,00 – 76,60	Kurang Baik
3	76,61 – 88,30	Baik
4	88,31 – 100,00	Sangat Baik

Sumber : PermenPANRB No. 14 Tahun 2017

TABEL 3.1.2.
KRITERIA PENILAIAN CAPAIAN KINERJA NILAI EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA

NO.	INTERVAL NILAI	NILAI KINERJA
1	>0 - 30	D (Sangat Kurang)
2	>30 – 50	C (Kurang)
3	>50 – 60	CC (Cukup / Memadai)
4	>60 - 70	B (Baik)
5	>70 - 80	BB (Sangat Baik)
6	>80 - 90	A (Memuaskan)
7	>90 - 100	AA (Sangat Memuaskan)

Sumber : PermenPANRB No. 88 Tahun 2022

TABEL 3.1.3.
KRITERIA PENILAIAN CAPAIAN KINERJA PENGUKURAN DAN EVALUASI
KINERJA ANGGARAN

NO.	INTERVAL NILAI	KINERJA ANGGARAN
1	0 – 50%	Sangat Kurang
2	>50% - 60%	Kurang
3	>60 – 80%	Cukup
4	>80% - 90%	Baik
5	>90%	Sangat Baik

Sumber : PMK No. 214/PMK.02/2017

Penjelasan lebih lanjut mengenai pengukuran dan hasil dari pengukuran tiap-tiap indikator kinerja sasaran strategis Biro Umum Tahun 2022, dapat disajikan pada Tabel 3.2.1 berikut ini disertai dengan tambahan keterangan atau penjelasannya.

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Berikut disajikan rekapitulasi hasil pengukuran terhadap 5 (lima) indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Umum Tahun 2022.

TABEL 3.2.1
REKAPITULASI HASIL PENGUKURAN
PERJANJIAN KINERJA BIRO UMUM TAHUN 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Meningkatnya Kepuasan Stakeholders di Bidang Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH, Pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	Sangat Baik (88,50)	Sangat Baik (89,38)	100,99	Sangat Baik
		IKM Pelayanan Pimpinan	Sangat Baik (88,50)	Sangat Baik (89,18)	100,76	Sangat Baik
		IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	Sangat Baik (88,50)	Sangat Baik (89,02)	100,59	Sangat Baik
2.	Terwujudnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (70,00)	BB (70,85)	101,21	Sangat Baik
3.	Meningkatnya pencapaian Target Retribusi	% realisasi penerimaan retribusi	95%	111,35%	117,21	Sangat Baik
Rata-rata Capaian Kinerja Keseluruhan					104,15	Sangat Baik

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2022

Dari Tabel 3.2.1 di atas, dapat dilihat capaian kinerja rata-rata 5 (lima) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan 3 (tiga) sasaran strategis Biro Umum Tahun 2022 adalah sebesar 104,15%. Dengan demikian hasil capaian kinerja lebih besar dari target yang ditetapkan termasuk klasifikasi berhasil dengan predikat **Sangat Baik**.

3.3 Capaian Kinerja Biro Umum Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Biro Umum Tahun 2022 sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, berikut ini akan disajikan evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran strategis

3.3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

1. Sasaran Strategis 1 : “Meningkatnya Kepuasan Stakeholders di Bidang Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH, Pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Setda”.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya Kepuasan Stakeholders Dibidang Pelayanan Tamu Rumah Tangga

KDH/WKDH, Pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Setda” terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, dengan capaian kinerja seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.3.1. berikut ini :

TABEL 3.3.1.1
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 1

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	IKM Pelayanan Tamu	Sangat Baik (88,50)	Sangat Baik (89,38)	100,99	Sangat Baik
2.	IKM Pelayanan Pimpinan	Sangat Baik (88,50)	Sangat Baik (89,18)	100,76	Sangat Baik
3.	IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	Sangat Baik (88,50)	Baik (89,02)	100,59	Sangat Baik
Rata-rata Capaian Kinerja				100,78	Sangat Baik

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2022

Dari Tabel 3.3.1.1 di atas dapat dilihat capaian kinerja rata-rata Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Kepuasan Stakeholders Dibidang Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH, Pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Setda” adalah sebesar 100,78%. Pencapaian ini masuk dalam kriteria “**Sangat Baik**”.

Analisis Capaian Indikator Kinerja

a. Indikator 1 : “IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH” (IKU)

“Target indikator kinerja adalah Sangat Baik (88,50), realisasi Sangat Baik (89,38) sehingga diperoleh persentase capaian sebesar 100,99%”.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan Biro Umum. Dalam survei ini dikhususkan pada ruang lingkup pelayanan tamu Rumah Tangga KDH/WKDH sehingga populasi survei adalah tamu rumah tangga KDH/WKDH yang dilayani. Survei dilakukan melalui kuesioner yang disebarakan pada Rumah Jabatan KDH/WKDH, Istana Bung Hatta dan Mess Bukit Lampu. Responden adalah pengguna layanan yang merupakan stakeholders Biro Umum, yaitu para tamu Rumah Tangga KDH/WKDH yang dilayani oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pengukuran indeks kepuasan pelayanan tamu ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pelaksanaan kegiatannya terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1) Tahap Perencanaan (desain survei)

Survei bertujuan untuk mendapatkan jawaban (variabel deskriptif) dari pertanyaan: “*seberapa tinggi tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan tamu Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Barat?*”.

Populasi adalah Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH yang dilayani oleh Biro Umum dengan pengambilan sampel sesuai petunjuk Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 menggunakan teknik pengambilan Morgan and Krejcie. Ditetapkan kuota sampel berjumlah 669 orang. Sampel diambil secara acak pada Rumah Jabatan KDH/WKDH, Istana Bung Hatta dan Mess Bukit Lampu. Penyusunan instrumen berupa kuesioner dilakukan dengan mempedomani ruang lingkup survei seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedomen Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Ada 9 unsur survei yang dijadikan pertanyaan survei yaitu :

- a) Persyaratan
- b) Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- c) Waktu Pelayanan
- d) Biaya / Tarif
- e) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- f) Kompetensi Pelaksana
- g) Perilaku Pelaksana
- h) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- i) Sarana dan Prasarana

2) Tahap Persiapan

Hal-hal yang perlu disiapkan diantaranya adalah

- a) Organisasi survei : Tim survei adalah tim survei internal Biro Umum
- b) Jadwal survei : Survei dilaksanakan pada Bulan Maret s/d Desember 2022
- c) Materi survei : Alat pengumpul data telah dipersiapkan berupa kuesioner

3) Pelaksanaan Lapangan

Pelaksanaan survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pengguna layanan (sampel) di Rumah Jabatan KDH/WKDH, Istana Bung Hatta Bukittinggi dan Mess Bukit Lampu.

4) Pengolahan Data

Setelah proses pengumpulan data melalui angket/kuesioner, maka data kuantitatif perlu diolah dengan statistic deskriptif. Data dikelompokkan dan ditabulasikan agar dapat disajikan melalui tabel, grafik atau diagram.

5) Penyajian dan Analisis

Analisis dilakukan dengan statistik deskriptif, yaitu dengan cara menyajikan data dalam bentuk tabulasi dan grafik. Data yang telah diolah ke dalam tabulasi dijumlahkan dan selanjutnya dihitung menggunakan rumus sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017.

Formula yang digunakan :

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 1.11$$

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$

Dari hasil pelaksanaan survei kepuasan pelayanan tamu tersebut, diperoleh indeks kepuasan pelayanan tamu Biro Umum adalah 89,38 kategori penilaian "Sangat Baik". Target tahun 2022 ini adalah Sangat Baik (88,50) dengan realisasi

sebesar 89,90% sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,99% termasuk kategori kinerja “Sangat Baik”.

Tabel hasil pengukuran setiap unsur SKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH tersaji pada Tabel berikut:

TABEL 3.3.1.2

**HASIL PENGUKURAN UNSUR IKM PELAYANAN TAMU RUMAH TANGGA
KDH/WKDH 2022**

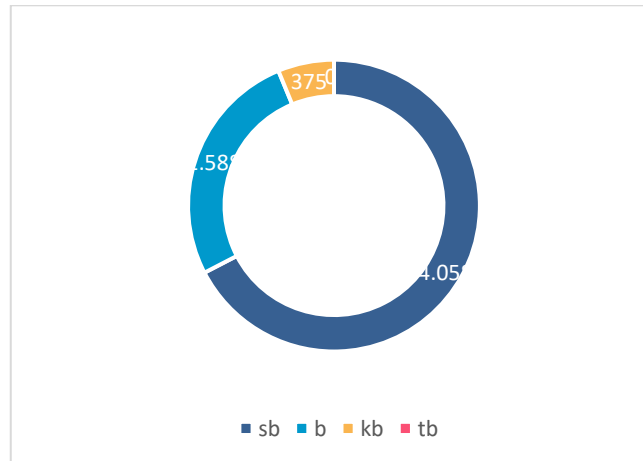
NO	Unsur IKM	Nilai Unsur IKM	Nilai Konversi	Nilai IKM per Unsur
1	Persyaratan	2528	0,42	93,52
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	2443	0,40	90,38
3	Waktu Penyelesaian	2329	0,38	86,16
4	Biaya / Tarif	2676	0,44	99,00
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	2447	0,40	90,53
6	Kompetensi Pelaksana	2233	0,37	82,61
7	Perilaku Pelaksana	2380	0,39	88,05
8	Sarana Dan Prasarana	2280	0,37	84,35
9	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	2427	0,40	89,79
JUMLAH			3,58	804,39
IKM (Skor x 25) / Nilai Rata-rata			89,38	89,38

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2022

Dari tabel diatas secara keseluruhan nilai IKM adalah 89,38 yang jika dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu 88,50 maka mendapat persentase capaian kinerja 100,99% termasuk kategori sangat baik dengan rincian nilai per unsur yang melebihi target tahun 2022 88,50 ada 5 unsur yaitu persyaratan 93,52, sistem, mekanisme dan prosedur 90,38, biaya / tarif 99,00, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 90,53 dan Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan 89,79. Namun demikian masih ada 4 unsur yang nilainya dibawah 88,50 namun masih dalam kategori baik yaitu waktu penyelesaian 86,16, kompetensi pelaksana 82,61, perilaku pelaksana 88,05 dan sarana dan prasarana 84,35

Distribusi tingkat kepuasan pengguna jasa atas layanan yang diberikan oleh Biro Umum dapat dilihat pada grafik berikut ini :

GRAFIK 3
IKM PELAYANAN TAMU RUMAH TANGGA KDH / WKDH TAHUN 2022



Berdasarkan grafik 3 tersebut dapat dilihat bahwa ada sekitar 67,40% tamu menilai sangat baik terhadap pelayanan yang diberikan, 26,37% tamu menilai baik, akan tetapi masih ada 6,23% tamu yang menilai kurang baik, namun tidak mempengaruhi capaian target sasaran strategis 1 yang artinya biro umum berhasil mencapai sasaran strategis 1 yaitu “Meningkatnya Kepuasan Stakeholders di Bidang Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH, Pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Setda”.

Di lain hal, angka 6,23% tamu yang menilai kurang baik terhadap pelayanan Biro Umum tetap menjadi perhatian, terutama yang dikeluhkan adalah kompetensi pelaksana yang akan terus ditingkatkan oleh Biro Umum melalui mengikutsertakan pelaksana pada bimtek yang relevan.

b. Indikator 2 : “IKM Pelayanan Pimpinan” (IKU)

“Target indikator kinerja adalah Sangat Baik (88,50), terealisasi Sangat Baik (89,18), sehingga diperoleh persentase capaian sebesar 100,76%”.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan Biro Umum. Dalam survei ini dikhususkan pada ruang

lingkup pelayanan pimpinan sehingga populasi survei adalah pimpinan. Survei dilakukan melalui kuesioner dengan responden adalah Staf Pimpinan yang merupakan stakeholders Biro Umum, yaitu pimpinan daerah dan pejabat pemerintahan level pimpinan yang dilayani oleh Biro Umum secara langsung. Pada survei kali ini yang menjadi responden ditetapkan adalah staf yang bertugas pada ruang kerja Sekda, Para Asisten, dan Para Staf Ahli Gubernur.

Pengukuran indeks kepuasan pelayanan pimpinan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pelaksanaan kegiatannya terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1) Tahap Perencanaan (desain survei)

Survei bertujuan untuk mendapatkan jawaban (variabel deskriptif) dari pertanyaan: “seberapa tinggi tingkat kepuasan pimpinan terhadap pelayanan Biro Umum Setda Prov. Sumatera Barat?”.

Populasi adalah Pimpinan sebagai penerima layanan dari Biro Umum. Pengambilan sampel sesuai petunjuk Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 menggunakan teknik pengambilan sampel Morgan and Krejcie. Ditetapkan sampel adalah pimpinan yang dilayani oleh Biro Umum langsung berjumlah 7 orang, yaitu Sekda, Para Asisten dan Para Staf Ahli Gubernur. Penyusunan instrumen berupa kuesioner dilakukan dengan mempedomani ruang lingkup survei seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedomen Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Ada 9 unsur survei yang dijadikan pertanyaan survei yaitu :

- a. Persyaratan
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- c. Waktu Pelayanan
- d. Biaya / Tarif

- e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- f. Kompetensi Pelaksana
- g. Perilaku Pelaksana
- h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- i. Sarana dan Prasarana

2) Tahap Persiapan

Hal-hal yang perlu disiapkan diantaranya adalah :

- a) Organisasi survei : Tim survei adalah tim survei internal Biro Umum
- b) Jadwal survei : Survei dilaksanakan pada Bulan Maret s/d Desember 2022
- c) Materi survei : Alat pengumpul data telah dipersiapkan berupa kuesioner

3) Pelaksanaan Lapangan

Pelaksanaan Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pimpinan (sampel) yang mendapat pelayanan langsung dari Biro Umum.

4) Pengolahan Data

Setelah proses pengumpulan data melalui angket/kuesioner, maka data kuantitatif perlu diolah dengan statistik deskriptif. Data dikelompokkan dan ditabulasikan agar dapat disajikan melalui tabel, grafik atau diagram.

5) Penyajian dan Analisis

Analisis dilakukan dengan statistik deskriptif, yaitu dengan cara menyajikan data dalam bentuk tabulasi dan grafik. Data yang telah diolah ke dalam tabulasi dijumlahkan dan selanjutnya dihitung menggunakan rumus sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017.

Formulasi yang digunakan :

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 1.11$$

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$

Dari hasil pelaksanaan survei kepuasan pelayanan pimpinan tersebut, diperoleh indeks kepuasan pelayanan pimpinan Biro Umum adalah 89,18 kategori penilaian “Sangat Baik”. Target tahun 2022 ini adalah Sangat Baik (88,50) dengan realisasi mencapai 89,18% sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,76% termasuk kategori kinerja “Sangat Baik”.

Tabel hasil pengukuran setiap unsur SKM Pelayanan Pimpinan tersaji pada Tabel berikut :

TABEL 3.3.1.3

HASIL PENGUKURAN UNSUR IKM PELAYANAN PIMPINAN 2022

NO	Unsur IKM	Nilai Unsur IKM	Nilai Konversi	Nilai IKM per Unsur
1	Persyaratan	26	0,41	91,93
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	25	0,39	88,39
3	Waktu Penyelesaian	25	0,39	88,39
4	Biaya / Tarif	28	0,44	99,00
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	27	0,42	95,46
6	Kompetensi Pelaksana	27	0,42	95,46
7	Perilaku Pelaksana	25	0,39	88,39
8	Sarana Dan Prasarana	17	0,27	60,11
9	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	27	0,42	95,46
JUMLAH			3,57	802,61
IKM (Skor x 25)			89,18	89,18

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2022

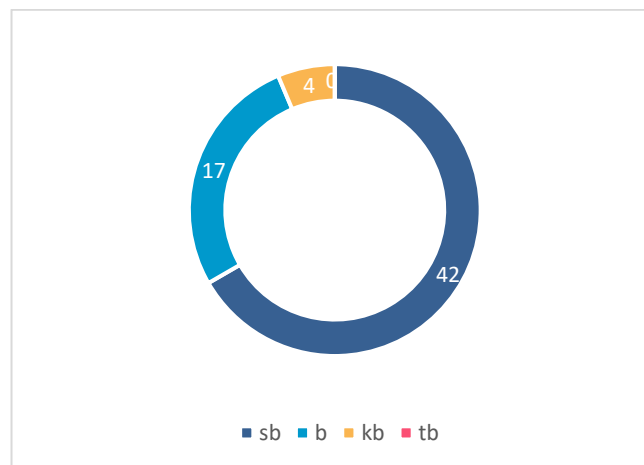
Dari tabel diatas secara keseluruhan nilai IKM adalah 89,18 yang jika dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu 88,50 maka mendapat persentase capaian kinerja 100,76% termasuk kategori sangat baik dengan rincian nilai per unsur yang melebihi target tahun 2022 88,50 ada 5 unsur yaitu persyaratan 91,93, biaya / tarif 99,00, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 95,46, Kompetensi Pelaksana 95,46 dan Penanganan Pengaduan, Saran Dan

Masukan 95,46. Namun demikian masih ada 4 unsur yang nilainya dibawah 88,50 namun masih dalam kategori baik yaitu Sistem, Mekanisme dan Prosedur 88,39, waktu penyelesaian 88,39, perilaku pelaksana 88,39 dan sarana dan prasarana 60,11.

Distribusi tingkat kepuasan pengguna jasa atas layanan yang diberikan oleh Biro Umum dapat dilihat pada grafik berikut ini:

GRAFIK 4

IKM PELAYANAN PIMPINAN BIRO UMUM TAHUN 2022



Berdasarkan grafik 4 tersebut dapat dilihat bahwa ada sekitar 66,67% pimpinan menilai sangat baik terhadap pelayanan yang diberikan, 26,98% pimpinan menilai baik, akan tetapi masih ada 6,35% pimpinan yang menilai kurang baik, namun tidak mempengaruhi capaian target sasaran strategis 1 yang artinya biro umum berhasil mencapai sasaran strategis 1 yaitu “Meningkatnya Kepuasan Stakeholders di Bidang Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH, Pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Setda”.

Di lain hal, angka 6,35% pimpinan yang menilai kurang baik terhadap pelayanan Biro Umum tetap menjadi perhatian, terutama yang dikeluhkan adalah sarana dan prasarana yang sebenarnya cukup tapi karena sudah lama jadi membuat penilaian terhadap pelayanan biro

umum menjadi kurang baik. Untuk itu, Biro Umum akan terus memperbaiki sarana dan prasarana penunjang pelayanan pimpinan agar tidak ada lagi pimpinan yang menilai kurang baik atau tidak baik terhadap pelayanan Biro Umum.

**c. Indikator 3 : “IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda”
“Target indikator kinerja adalah Sangat Baik (88,50),
teralisasi Sangat Baik (89,02), sehingga diperoleh
persentase capaian sebesar 100,59%”.**

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan Biro Umum. Dalam survei ini dikhususkan pada ruang lingkup pelayanan administrasi keuangan setda sehingga populasi survei adalah Kasubag TU/Keuangan, Bendahara dan Staf Keuangan/Bendahara.

Survei dilakukan melalui kuesioner dengan responden adalah stakeholders Biro Umum, yaitu Kasubag TU, Bendahara dan staf yang dilayani oleh Biro Umum secara langsung.

Pengukuran indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan setda ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pelaksanaan kegiatannya terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1) Tahap Perencanaan (desain survei)

Survei bertujuan untuk mendapatkan jawaban (variabel deskriptif) dari pertanyaan: “seberapa tinggi tingkat kepuasan pengelola keuangan biro-biro lingkup setda terhadap pelayanan Biro Umum Setda Prov. Sumatera Barat?”.

Populasi adalah Kasubag TU/Keuangan, Bendahara dan Staf Keuangan/Bendahara sebagai penerima layanan dari Biro Umum. Pengambilan sampel sesuai petunjuk Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 menggunakan teknik pengambilan sampel Morgan and Krejcie. Ditetapkan sampel adalah Kasubag TU/Keuangan, Bendahara dan Staf

Keuangan/Bendahara yang dilayani oleh Biro Umum langsung berjumlah 27 orang. Penyusunan instrumen berupa kuesioner dilakukan dengan mempedomani ruang lingkup survei seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Ada 9 unsur survei yang dijadikan pertanyaan survei yaitu :

- a. Persyaratan
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- c. Waktu Pelayanan
- d. Biaya / Tarif
- e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- f. Kompetensi Pelaksana
- g. Perilaku Pelaksana
- h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- i. Sarana dan Prasarana

2) Tahap Persiapan

Hal-hal yang perlu disiapkan diantaranya adalah :

- a) Organisasi survei : Tim survei adalah tim survei internal Biro Umum
- b) Jadwal survei : Survei dilaksanakan pada Bulan Maret s/d Desember 2022
- c) Materi survei : Alat pengumpul data telah dipersiapkan berupa kuesioner

3) Pelaksanaan Lapangan

Pelaksanaan Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada Kasubag TU/Keuangan, Bendahara dan Staf Keuangan/Bendahara (sampel) yang mendapat pelayanan langsung dari Biro Umum.

4) Pengolahan Data

Setelah proses pengumpulan data melalui angket/kuesioner, maka data kuantitatif perlu diolah dengan statistik deskriptif.

Data dikelompokkan dan ditabulasikan agar dapat disajikan melalui tabel, grafik atau diagram.

5) Penyajian dan Analisis

Analisis dilakukan dengan statistik deskriptif, yaitu dengan cara menyajikan data dalam bentuk tabulasi dan grafik. Data yang telah diolah ke dalam tabulasi dijumlahkan dan selanjutnya dihitung menggunakan rumus sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017.

Formula yang digunakan :

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 1.11$$

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Dari hasil pelaksanaan survei kepuasan pelayanan pimpinan tersebut, diperoleh indeks kepuasan pelayanan pimpinan Biro Umum adalah 89,02 kategori penilaian “Sangat Baik”. Target tahun 2022 ini adalah Sangat Baik (88,50) dengan realisasi mencapai 89,02% sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,59% termasuk kategori kinerja “Sangat Baik”.

Tabel hasil pengukuran setiap unsur IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda tersaji pada Tabel berikut :

TABEL 3.3.1.4

**HASIL PENGUKURAN UNSUR IKM PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN
SETDA 2022**

NO	Unsur SKM	Nilai Unsur SKM	Nilai Konversi	Nilai IKM per Unsur
1	Persyaratan	106	0,43	97,17
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	91	0,37	83,42
3	Waktu Penyelesaian	89	0,36	81,58
4	Biaya / Tarif	108	0,44	99,00
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	92	0,37	84,33
6	Kompetensi Pelaksana	107	0,44	98,08

NO	Unsur SKM	Nilai Unsur SKM	Nilai Konversi	Nilai IKM per Unsur
7	Perilaku Pelaksana	105	0,43	96,25
8	Sarana Dan Prasarana	80	0,33	73,33
9	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	96	0,39	88,00
JUMLAH			3,56	801,17
IKM (Skor x 25)			89,02	89,02

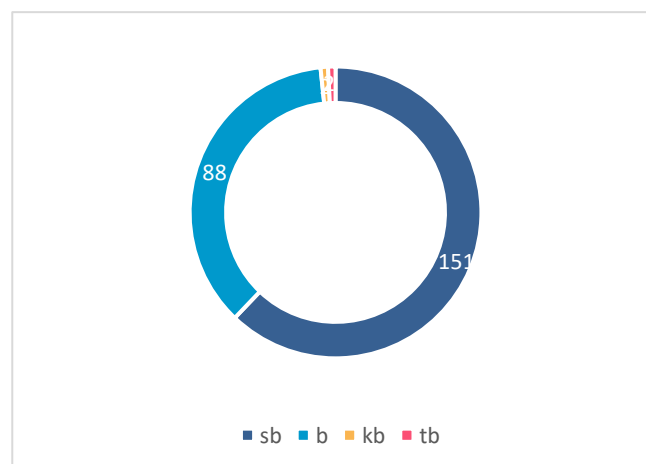
Sumber : Data Olahan Biro Umum 2022

Dari tabel diatas secara keseluruhan nilai IKM adalah 89,02 yang jika dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu 88,50 maka mendapat persentase capaian kinerja 100,59% termasuk kategori sangat baik dengan rincian nilai per unsur yang melebihi target tahun 2022 88,50 ada 4 unsur yaitu persyaratan 97,17, biaya / tarif 99,00, Kompetensi Pelaksana 98,08 dan Perilaku Pelaksana 96,25. Namun demikian masih ada 5 unsur yang nilainya dibawah 88,50 namun masih dalam kategori baik yaitu Sistem, Mekanisme dan Prosedur 83,42, waktu penyelesaian 81,58, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 84,33, sarana dan prasarana 73,33 serta Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan 88,00.

Distribusi tingkat kepuasan pengguna jasa atas layanan yang diberikan oleh Biro Umum dapat dilihat pada grafik berikut ini:

GRAFIK 4

IKM PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN SETDA BIRO UMUM TAHUN 2022



Berdasarkan grafik 4 tersebut dapat dilihat bahwa ada sekitar 62,14% pengelola keuangan biro-biro menilai sangat baik terhadap pelayanan yang diberikan, 36,22% pengelola keuangan biro-biro menilai baik, akan tetapi masih ada 0,82% pengelola keuangan biro-biro yang menilai kurang baik dan 0,82% pengelola keuangan biro-biro menilai tidak baik, namun tidak mempengaruhi capaian target sasaran strategis 1 yang artinya biro umum berhasil mencapai sasaran strategis 1 yaitu “Meningkatnya Kepuasan Stakeholders di Bidang Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH, Pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Setda”.

Di lain hal, angka 0,82% pengelola keuangan biro-biro yang menilai kurang baik dan 0,82% pengelola keuangan biro-biro tidak baik terhadap pelayanan Biro Umum tetap menjadi perhatian, terutama yang dikeluhkan adalah sarana dan prasarana yang sebenarnya cukup tapi karena sudah lama jadi membuat penilaian terhadap pelayanan biro umum menjadi kurang baik. Untuk itu, Biro Umum akan terus memperbaiki sarana dan prasarana penunjang pelayanan administrasi keuangan setda agar tidak ada lagi pengelola keuangan biro-biro yang menilai kurang baik atau tidak baik terhadap pelayanan Biro Umum. Selain itu ada juga pada waktu penyelesaian yang terkadang tidak sesuai dengan waktu penyelesaian sesuai SOP nya, hal ini disebabkan karena Sumber Daya Manusia yang kurang dari segi kuantitas selain disebabkan karena pengembalian perbaikan atas verifikasi biro umum yang juga terlambat datang ke Biro Umum Kembali.

2. Sasaran Strategis 2 : “Terwujudnya Tata Kelola Organisasi”

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 2 “Terwujudnya Tata Kelola Organisasi” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.3.2.1 berikut ini :

TABEL 3.3.1.5
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 2

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (70,00)	BB (70,85)	101,21	Sangat Baik

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja Sasaran Strategis 2 “Terwujudnya Tata Kelola Organisasi” mencapai 101,21%, pencapaian ini masuk dalam kriteria “**Sangat Baik**”.

Indikator 1 “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja”

“Target indikator kinerja adalah BB (70), realisasi mencapai BB (70,85) sehingga diperoleh persentase capaian sebesar 101,21%”.

Indikator ini bertujuan untuk melihat tingkat capaian akuntabilitas kinerja organisasi Tahun sebelumnya (2021) yang diperoleh dari hasil evaluasi terhadap LAKIP yang dikeluarkan Inspektorat pada bulan Februari Tahun 2022. Penilaian terhadap akuntabilitas kinerja perangkat daerah di lakukan oleh Inspektorat Provinsi pada Bulan Februari tahun 2022 secara komprehensif terhadap unsur-unsur penilaian yang telah diatur dalam Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Komponen yang dievaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini meliputi :

- 1) Perencanaan Kinerja (bobot 30%)
- 2) Pengukuran Kinerja (bobot 25%)
- 3) Pelaporan Kinerja (bobot 15%)
- 4) Evaluasi Internal (bobot 10%)
- 5) Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi (20%)

Dari hasil evaluasi LAKIP Tahun 2022 tersebut, Biro Umum memperoleh nilai 70,85 naik yang sedikit lebih tinggi dari target tahun

2022 yaitu 70,00. Kategori penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Masuk pada kategori **BB (>70-80)** dengan interpretasi *Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kerja yang andal.*

3. Sasaran Strategis 3 : “*Meningkatnya pencapaian Target Retribusi*”

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 3 “*Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi*” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.3.3.1 berikut ini :

TABEL 3.3.1.6
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 3

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1	% Realisasi Penerimaan Retribusi	95%	111,35%	117,21%	Sangat Baik

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja Sasaran Strategis 3 “*Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi*” mencapai **117,21%**, pencapaian ini masuk dalam kriteria “**Sangat Baik**”.

Pengukuran capaian kinerja anggaran diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran.

Target Retribusi Biro Umum adalah Rp.255.050.000 dengan realisasi Rp.284.000.000 dengan realisasi sebesar 111,35%.

Berdasarkan hal diatas, target yang ditetapkan adalah 95% dengan realisasi sebesar 111,35% dengan capaian 117,21% atau dengan kata lain capaian target tercapai dengan kategori “sangat baik”.

3.3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2026

Realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja 1 “IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH”, 2 “IKM Pelayanan Pimpinan”, 3 “IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda”, 4 “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” dan 5 “% Realisasi Penerimaan Retribusi” dari tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel 3.3.2.1 berikut ini :

TABEL 3.3.2.1
REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 – 2026

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI						% CAPAIAN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	(89,90) Sangat Baik	(89,38) Sangat Baik					101,80	100,99				
2.	IKM Pelayanan Pimpinan	(88,39) Sangat Baik	(89,18) Sangat Baik					100,09	100,76				
3.	IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	(87,90) Sangat Baik	(89,02) Sangat Baik					99,54	100,59				
4.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	(72,86) Sangat Baik	(70,85) Sangat Baik					104,09	101,21				
5.	% Realisasi Penerimaan Retribusi	(204,17) Sangat Baik	(111,35) Sangat Baik					214,92	117,21				
	Rata-rata capaian	108,64	89,96					124,09	104,15				

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2022

Dari tabel 3.3.2.1 di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Biro Umum tahun 2021 dan 2022 tercapai dengan predikat Sangat Baik. Namun jika dibandingkan dari tahun 2021 dengan realisasi 108,64

dengan capaian 124,09 menurun di tahun 2022 dengan realisasi 89,96 dengan capaian 104,15.

1. Sasaran Strategis 1 : “Meningkatnya Kepuasan Stakeholders di Bidang Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH, Pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Setda”.

Realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja 1 “IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH”, 2 “IKM Pelayanan Pimpinan”, 3 “IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda” dari tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel 3.3.2.2 berikut ini :

TABEL 3.3.2.2

REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 1 TAHUN 2021 – 2026

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI						% CAPAIAN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	(89,90) Sangat Baik	(89,38) Sangat Baik					101,80	100,99				
2.	IKM Pelayanan Pimpinan	(88,39) Sangat Baik	(89,18) Sangat Baik					100,09	100,76				
3.	IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	(87,90) Sangat Baik	(89,02) Sangat Baik					99,54	100,59				
	Rata-rata capaian	88,73	89,19					100,48	100,78				

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2022

Dari table 3.3.2.2 di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Sasaran Startegis 1 Biro Umum tahun 2021 dan 2022 tercapai dengan predikat Sangat Baik. Dan jika dibandingkan dari tahun 2021 dengan realisasi 88,73 dengan capaian 100,48 naik di tahun 2022 dengan realisasi 89,19 dengan capaian 100,78.

a. Indikator 1 : “IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH”

Dari table 3.3.2.2 di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis 1 Indikator 1 Biro Umum tahun 2021 dan 2022 tercapai dengan predikat Sangat Baik. Namun jika dibandingkan dari tahun 2021 dengan realisasi 89,90 dengan capaian 101,80 turun di tahun 2022 dengan realisasi 89,38 dengan capaian 100,99.

b. Indikator 2 : “IKM Pelayanan Pimpinan”

Dari table 3.3.2.2 di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis 1 Indikator 2 Biro Umum tahun 2021 dan 2022 tercapai dengan predikat Sangat Baik. Dan jika dibandingkan dari tahun 2021 dengan realisasi 88,39 dengan capaian 100,09 turun di tahun 2022 dengan realisasi 89,18 dengan capaian 100,76.

c. Indikator 3 : “IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda”

Dari table 3.3.2.2 di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis 1 Indikator 2 Biro Umum tahun 2021 tidak tercapai dengan predikat Baik dan 2022 tercapai dengan predikat Sangat Baik. Dan jika dibandingkan dari tahun 2021 dengan realisasi 87,90 dengan capaian 99,54 turun di tahun 2022 dengan realisasi 89,02 dengan capaian 100,59.

2. Sasaran Strategis 2 : “Terwujudnya Tata Kelola Organisasi”

Realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja 4 “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” dari tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel 3.3.2.3 berikut ini :

TABEL 3.3.2.3

REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 2 TAHUN 2021 – 2026

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI						% CAPAIAN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	(72,86) Sangat Baik	(70,85) Sangat Baik					104,09	101,21				
	Rata-rata capaian	(72,86)	(70,85)					104,09	101,21				

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2022

Pada Sasaran Strategis 2 ini hanya ada 1 indikator yaitu Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Jika dilihat dari table 3.3.2.3 diatas bahwa sebenarnya target tahun 2021 dan 2022 tercapai dengan predikat Sangat Baik. Melihat perbandingan antara tahun 2021 dan 2022 terdapat penurunan namun tidak mempengaruhi kinerja yaitu jika tahun 2021 realisasi 72,86 dengan capaian 104,09 sedangkan di tahun 2022 realisasi 70,85 dengan capaian 101,21.

3. Sasaran Strategis 3 : “Meningkatnya pencapaian Target Retribusi”

Realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja 5 “Meningkatnya pencapaian target retribusi” dari tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel 3.3.2.4 berikut ini :

TABEL 3.3.2.4

REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 3 TAHUN 2021 – 2026

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI						% CAPAIAN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.	% Realisasi	(204,17)	(111,35)					214,92	117,21				
	Penerimaan Retribusi	Sangat Baik	Sangat Baik										
	Rata-rata capaian	(204,17)	(111,35)					214,92	117,21				

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2022

Pada Sasaran Strategis 2 ini hanya ada 1 indikator yaitu % Realisasi Penerimaan Retribusi. Jika dilihat dari table 3.3.2.4 diatas bahwa sebenarnya target tahun 2021 dan 2022 tercapai dengan predikat Sangat Baik. Melihat perbandingan antara tahun 2021 dan 2022 terdapat penurunan namun tidak mempengaruhi kinerja yaitu jika tahun 2021 Target Retribusi Biro Umum adalah Rp.66.000.000 dengan realisasi Rp.134.750.000 atau 204,17% dengan capaian 214,92 sedangkan di tahun 2022 Target Retribusi Biro Umum adalah Rp.255.050.000 dengan realisasi Rp.284.000.000 atau 111,35% dengan capaian 117,21%.

3.3.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

1. Sasaran Strategis 1 : “Meningkatnya Kepuasan Stakeholders di Bidang Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH, Pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Setda”.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah untuk Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Kepuasan Stakeholders Dibidang Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH, Pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Setda” dapat dilihat pada Tabel 3.3.3.1 berikut ini.

TABEL 3.3.3.1
REALISASI KINERJA TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH SASARAN STRATEGIS 1

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	(88,31) Sangat Baik	(88,50) Sangat Baik	(88,70) Sangat Baik	(88,90) Sangat Baik	(89,10) Sangat Baik	(89,30) Sangat Baik	(89,90) Sangat Baik	(89,38) Sangat Baik				
2.	IKM Pelayanan Pimpinan	(88,31) Sangat Baik	(88,50) Sangat Baik	(88,70) Sangat Baik	(88,90) Sangat Baik	(89,10) Sangat Baik	(89,30) Sangat Baik	(88,39) Sangat Baik	(89,18) Sangat Baik				
3.	IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	(88,31) Sangat Baik	(88,50) Sangat Baik	(88,70) Sangat Baik	(88,90) Sangat Baik	(89,10) Sangat Baik	(89,30) Sangat Baik	(87,90) Baik	(89,02) Sangat Baik				

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2022

Tabel 3.3.3.1 memperlihatkan realisasi kinerja terhadap target kinerja jangka menengah seperti yang tertuang dalam dokumen Renstra SKPD. Berikut uraian perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah :

- a. Realisasi indikator 1 “IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH” pada tahun 2021 mendapat skor sebesar 89,90% yang berarti “Sangat Baik”. Tingkat realisasi ini lebih besar dibandingkan target jangka menengah “Sangat Baik” (88,31).

Sedangkan untuk tahun 2022 mendapat skor 89,38% dengan predikat “Sangat Baik” tingkat realisasi ini lebih tinggi dibanding target jangka menengah 88,50 “Sangat Baik”.

- b. Realisasi indikator 2 “IKM Pelayanan Pimpinan” pada tahun 2021 mendapat skor sebesar 88,39% yang berarti “Sangat Baik”. Tingkat realisasi ini lebih besar dibandingkan target jangka menengah “Sangat Baik” (88,31). Sedangkan untuk tahun 2022 mendapat skor 89,18% dengan predikat “Sangat Baik” tingkat realisasi ini lebih tinggi dibanding target jangka menengah 88,50 “Sangat Baik”.
- c. Realisasi indikator 1 “IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda” pada tahun 2021 mendapat skor sebesar 87,90% yang berarti “Baik”. Tingkat realisasi ini lebih kecil dibandingkan target jangka menengah “Sangat Baik” (88,31). Sedangkan untuk tahun 2022 mendapat skor 89,02% dengan predikat “Sangat Baik” tingkat realisasi ini lebih tinggi dibanding target jangka menengah 88,50 “Sangat Baik”.

2. Sasaran Strategis 2 : “Terwujudnya Tata Kelola Organisasi”

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah untuk Sasaran Strategis 2 “Terwujudnya Tata Kelola Organisasi” dapat dilihat pada Tabel 3.3.3.2 berikut ini. Dapat dilihat capaian kinerja yang cukup baik dengan indikasi bahwa realisasi kinerja yang lebih tinggi dan mencapai target yang telah ditentukan.

TABEL 3.3.3.2

REALISASI KINERJA TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH SASARAN STRATEGIS 2

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (70,00)	BB (70,00)	BB (70,00)	BB (70,00)	BB (70,00)	BB (70,00)	BB (72,86)	BB (70,85)				

Sumber : Data Olahan Biro Umum

Dari tabel 3.3.3.2 di atas, dapat dilihat bahwa Realisasi indikator “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” pada tahun 2021 mendapat skor sebesar 72,86% yang berarti predikat “BB”. Tingkat realisasi ini lebih besar dibandingkan target jangka menengah predikat “BB” (70,00). Sedangkan untuk tahun 2022 mendapat skor 70,85% dengan predikat “BB” tingkat realisasi ini lebih tinggi dibanding target jangka menengah 70,00 “BB”.

3. Sasaran Strategis 3 : “Meningkatnya pencapaian Target Retribusi”

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah untuk Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi” dapat dilihat pada Tabel 3.3.3.3 berikut ini. Dapat dilihat capaian kinerja yang cukup baik dengan indikasi bahwa realisasi kinerja yang lebih tinggi dan mencapai target yang telah ditentukan.

TABEL 3.3.3.3

REALISASI KINERJA TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH SASARAN STRATEGIS 3

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	% Realisasi Penerimaan Retribusi	95%	95%	95%	95%	95%	95%	204,17	111,35				

Sumber : Data Olahan Biro Umum

Dari tabel 3.3.3.3 di atas, dapat dilihat bahwa Realisasi indikator “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” Melihat perbandingan antara tahun 2021 dan 2022 terdapat penurunan namun tidak mempengaruhi kinerja yaitu jika tahun 2021 Target Retribusi Biro Umum adalah Rp.66.000.000 dengan realisasi Rp.134.750.000 atau 204,17% dengan capaian 214,92 sedangkan di tahun 2022 Target Retribusi Biro Umum adalah Rp.255.050.000 dengan realisasi Rp.284.000.000 atau 111,35% dengan capaian 117,21%.

3.3.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Secara khusus untuk sasaran strategis Biro Umum tidak dapat diperbandingkan secara nasional karena tidak ada secara persis yang sama dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi lainnya yang sama Sasaran Strategisnya dengan Biro Umum Provinsi Sumatera Barat.

3.3.5 Analis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Pada sub bab ini, menyajikan Analis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi untuk kinerja tahun 2022 untuk masing-masing Sasaran Strategis

1. Sasaran Strategis 1 : *“Meningkatnya Kepuasan Stakeholders di Bidang Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH, Pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Setda”*.

Pada sasaran strategis 1 ini terdapat 3 indikator, berikut adalah Analis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi untuk kinerja tahun 2022 yaitu :

a. Indikator Kinerja 1 : *“IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH”*

Analis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi untuk kinerja tahun 2022 diambil dari menganalisis hasil olahan questioner :

Analis Penyebab Keberhasilan

Dari 9 Unsur IKM yang di uji melalui questioner terdapat 5 unsur yang menjadi kekuatan keberhasilan kinerja biro umum tahun 2022 yaitu :

- 1) Persyaratan : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap persyaratan dalam mendapat pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH tidak sulit hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 93,52 dengan

predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,50 “Sangat Baik”.

- 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap SOP dalam mendapat pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH tidak sulit hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 90,38 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,50 “Sangat Baik”.
- 3) Biaya / Tarif : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap Biaya / Tarif dalam mendapat pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH adalah gratis hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 99,00 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,50 “Sangat Baik”.
- 4) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap Produk Pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH sangat jelas hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 90,53 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,50 “Sangat Baik”.
- 5) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap setiap pengaduan, saran dan masukan dalam hal pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH cepat ditanggapi hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 89,79 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,50 “Sangat Baik”.

Analisis Penyebab Kegagalan

Dari 9 Unsur IKM yang di uji melalui questioner terdapat 4 unsur yang menjadi kelemahan keberhasilan kinerja biro umum tahun 2022 namun masih dalam kategori “Baik” yaitu :

- 1) Waktu Penyelesaian : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap waktu penyelesaian dalam

mendapat pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH masih sedikit lebih lama hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 86,16 dengan predikat “Baik” dimana targetnya yaitu 88,50 “Sangat Baik”.

- 2) Kompetensi Pelaksana : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap kompetensi pelaksana dalam melaksanakan pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH dianggap masih kurang hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 82,61 dengan predikat “Baik” dimana targetnya yaitu 88,50 “Sangat Baik”.
- 3) Perilaku Pelaksana : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap perilaku pelaksana dalam melaksanakan pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH masih sedikit kurang baik hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 88,05 dengan predikat “Baik” dimana targetnya yaitu 88,50 “Sangat Baik”.
- 4) Sarana dan Prasarana pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH masih kurang hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 84,35 dengan predikat “Baik” dimana targetnya yaitu 88,50 “Sangat Baik”.

Analisis Peningkatan/Penurunan

Dalam hal pencapaian target kinerja jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan kinerja biro umum pada indikator pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH secara umum terdapat peningkatan karena hasil IKM yaitu 89,38 dengan target 88,50 keadaan ini disebabkan karena Persyaratan, SOP, Biaya, Jenis Produk dan tindak lanjut terhadap keluhan pengaduan atau saran dan masukan ditanggapi dengan cepat.

Namun jika dibandingkan dari tahun lalu tahun 2021 realisasi 89,90 dan turun di tahun 2022 menjadi 89,38 penyebab penurunan

kinerja ini disebabkan karena kuantitas SDM pelayanan yang kurang karena adanya ASN yang pensiun sedangkan pengadaan CPNS belum ada.

Alternatif Solusi atau Tindak Lanjut

Berdasarkan analisis diatas, ada beberapa alternatif solusi atau tindak lanjut yang akan dilakukan Biro Umum untuk peningkatan kinerja ditahun berikutnya yaitu :

- 1) Membuatkan SOP dalam hal waktu penyelesaian yang jelas
- 2) Melakukan recruitment tenaga kontrak pramusaji yang akan menjadi pelayanan tamu KDH/WKDH
- 3) Melaksanakan dan mengikutsertakan ASN dan Non ASN yang bertugas secara langsung dalam pelaksanaan pelayanan tamu KDH/WKDH dalam Bimtek terkait.
- 4) Memperbaharui sarana dan prasarana baik melalui pemeliharaan atau melalui pengadaan baru sesuai ketersediaan anggaran.

b. Indikator Kinerja 2 : “IKM Pelayanan Pimpinan”

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi untuk kinerja tahun 2022 diambil dari menganalisis hasil olahan questioner :

Analisis Penyebab Keberhasilan

Dari 9 Unsur IKM yang di uji melalui questioner terdapat 5 unsur yang menjadi kekuatan keberhasilan kinerja biro umum tahun 2022 yaitu :

- 1) Persyaratan : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap persyaratan dalam mendapat pelayanan Pimpinan tidak sulit hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 91,93 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,50 “Sangat Baik”.
- 2) Biaya / Tarif : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap Biaya / Tarif dalam mendapat pelayanan pimpinan adalah gratis hal ini dapat dilihat bahwa

untuk unsur ini mendapat nilai 99,00 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,50 “Sangat Baik”.

- 3) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap Produk Pelayanan pimpinan sangat jelas hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 95,46 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,50 “Sangat Baik”.
- 4) Kompetensi Pelaksana : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap Kompetensi Pelaksana sangat kompeten hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 95,46 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,50 “Sangat Baik”.
- 5) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap setiap pengaduan, saran dan masukan dalam hal pelayanan pimpinan cepat ditanggapi hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 95,46 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,50 “Sangat Baik”.

Analisis Penyebab Kegagalan

Dari 9 Unsur IKM yang di uji melalui questioner terdapat 4 unsur yang menjadi kelemahan kinerja biro umum tahun 2022 namun masih dalam kategori “Baik” yaitu :

- 1) Sistem, Mekanisme dan Prosedur : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap SOP dalam mendapat pelayanan pimpinan masih berbelit-belit hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 88,39 dengan predikat “Sangat Baik” dimana targetnya yaitu 88,50 “Sangat Baik”. Sebenarnya dalam unsur ini jika berpatokan pada standar minimal sesuai PerMenPAN&RB nomor 14 tahun 2017 unsur ini telah melebihi predikat sangat baik yaitu 88,31, namun karena target yang ditetapkan tinggi maka unsur ini termasuk dalam kategori yang melemahkan kinerja secara keseluruhan.

- 2) Waktu Penyelesaian : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap waktu penyelesaian dalam mendapat pelayanan pimpinan masih sedikit lebih lama hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 88,39 dengan predikat “Sangat Baik” dimana targetnya yaitu 88,50 “Sangat Baik”. Sebenarnya dalam unsur ini jika berpatokan pada standar minimal sesuai PerMenPAN&RB nomor 14 tahun 2017 unsur ini telah melebihi predikat sangat baik yaitu 88,31, namun karena target yang ditetapkan tinggi maka unsur ini termasuk dalam kategori yang melemahkan kinerja secara keseluruhan
- 3) Perilaku Pelaksana : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap perilaku pelaksana dalam melaksanakan pelayanan pimpinan masih sedikit kurang baik hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 88,39 dengan predikat “Sangat Baik” dimana targetnya yaitu 88,50 “Sangat Baik”. Sebenarnya dalam unsur ini jika berpatokan pada standar minimal sesuai PerMenPAN&RB nomor 14 tahun 2017 unsur ini telah melebihi predikat sangat baik yaitu 88,31, namun karena target yang ditetapkan tinggi maka unsur ini termasuk dalam kategori yang melemahkan kinerja secara keseluruhan
- 4) Sarana dan Prasarana pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan Pimpinan masih sangat kurang hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 60,11 dengan predikat “Tidak Baik” dimana targetnya yaitu 88,50 “Sangat Baik”.

Analisis Peningkatan/Penurunan

Dalam hal pencapaian target kinerja jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan kinerja biro umum pada indikator pelayanan Pimpinan secara umum terdapat peningkatan karena hasil IKM yaitu 89,18 dengan target 88,50 keadaan ini disebabkan

karena Persyaratan, SOP, Biaya, Jenis Produk, kompetensi pelaksana dan tindak lanjut terhadap keluhan pengaduan atau saran dan masukan ditanggapi dengan cepat.

Dan jika dibandingkan dari tahun lalu tahun 2021 realisasi 88,39 dan naik di tahun 2022 menjadi 89,18 penyebab peningkatan ini adalah adanya sedikit perbaikan dari segi prasarana dan prasaran namun masih dalam kategori tidak baik yaitu dari 53,04 menjadi 60,11.

Alternatif Solusi atau Tindak Lanjut

Berdasarkan analisis diatas, ada beberapa alternatif solusi atau tindak lanjut yang akan dilakukan Biro Umum untuk peningkatan kinerja ditahun berikutnya yaitu :

- 1) Membuatkan SOP yang jelas dan lebih simple, dan menjelaskan waktu penyelesaiannya dalam SOP
- 2) Melaksanakan dan mengikutsertakan ASN dan Non ASN yang bertugas secara langsung dalam pelaksanaan pelayanan bimtek dalam Bimtek terkait.
- 3) Memperbaharui sarana dan prasarana baik melalui pemeliharaan atau melalui pengadaan baru sesuai ketersediaan anggaran.

c. Indikator Kinerja 3 : “IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda”

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi untuk kinerja tahun 2022 diambil dari menganalisis hasil olahan questioner :

Analisis Penyebab Keberhasilan

Dari 9 Unsur IKM yang di uji melalui questioner terdapat 4 unsur yang menjadi kekuatan keberhasilan kinerja biro umum tahun 2022 yaitu :

- 1) Persyaratan : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap persyaratan dalam mendapat pelayanan Administrasi Keuangan Setda tidak sulit hal ini dapat

dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 97,17 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,50 “Sangat Baik”.

- 2) Biaya / Tarif : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap Biaya / Tarif dalam mendapat pelayanan administrasi keuangan setda adalah gratis hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 99,00 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,50 “Sangat Baik”.
- 3) Kompetensi Pelaksana : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap Kompetensi Pelaksana sangat kompeten hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 98,08 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,50 “Sangat Baik”.
- 4) Perilaku Pelaksana : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap setiap pelaksana dalam hal pelayanan administrasi keuangan setda sangat ramah dan sopan hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 96,25 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,50 “Sangat Baik”.

Analisis Penyebab Kegagalan

Dari 9 Unsur IKM yang di uji melalui questioner terdapat 5 unsur yang menjadi kelemahan kinerja biro umum tahun 2022 namun masih dalam kategori “Baik” yaitu :

- 1) Sistem, Mekanisme dan Prosedur : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap SOP dalam mendapat pelayanan administrasi keuangan setda masih berbelit-belit hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 83,42.
- 2) Waktu Penyelesaian : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap waktu penyelesaian dalam mendapat pelayanan administrasi keuangan setda masih sedikit

lebih lama hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 81,58 dengan predikat “Baik” dimana targetnya yaitu 88,50 “Sangat Baik”.

- 3) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap Produk Pelayanan administrasi keuangan setda kurang jelas hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 84,33 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,50 “Sangat Baik
- 4) Sarana dan Prasarana : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan administrasi keuangan setda masih sangat kurang hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 73,33 dengan predikat “Baik” dimana targetnya yaitu 88,50 “Sangat Baik”.
- 5) Penanganan pengaduan, saran dan masukan : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap tanggapan atas pengaduan, saran dan masukan dalam mendukung pelayanan administrasi keuangan setda masih sangat kurang hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 88,00 dengan predikat “Baik” dimana targetnya yaitu 88,50 “Sangat Baik”

Analisis Peningkatan/Penurunan

Dalam hal pencapaian target kinerja jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan kinerja biro umum pada indikator pelayanan administrasi keuangan setda secara umum terdapat peningkatan karena hasil IKM yaitu 89,02 dengan target 88,50 keadaan ini disebabkan karena Persyaratan, kompetensi dan perilaku pelaksana yang ramah dan sopan.

Dan jika dibandingkan dari tahun lalu tahun 2021 realisasi 87,90 dengan predikat “Baik” dan naik di tahun 2022 menjadi 89,02 dengan predikat “Sangat Baik” penyebab peningkatan ini adalah

adanya sedikit perbaikan dari segi sarana dan prasarana serta perbaikan SOP.

Alternatif Solusi atau Tindak Lanjut

Berdasarkan analisis diatas, ada beberapa alternatif solusi atau tindak lanjut yang akan dilakukan Biro Umum untuk peningkatan kinerja ditahun berikutnya yaitu :

- 1) Membuatkan SOP yang jelas dan lebih simple, dan menjelaskan waktu penyelesaiannya dalam SOP serta memasukkan tanggapan atas pengaduan, saran dan masukan ke dalam SOP
- 2) Melaksanakan dan mengikutsertakan ASN dan Non ASN yang bertugas secara langsung dalam pelaksanaan pelayanan bimtek dalam Bimtek terkait.
- 3) Memperbaharui sarana dan prasarana baik melalui pemeliharaan atau melalui pengadaan baru sesuai ketersediaan anggaran.

2. Sasaran Strategis 2 : “Terwujudnya Tata Kelola Organisasi”

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi untuk kinerja tahun 2022 diambil dari menganalisis hasil evaluasi SAKIP Biro Umum tahun 2021:

Analisis dan Tindak Lanjut Evaluasi LKj Biro Umum Tahun 2021

1) Perencanaan Kinerja (bobot 30%) realisasi bobot 24,66

Dari hasil evaluasi oleh Inspektorat LKj Biro Umum Tahun 2021 mendapat bobot 24,66%, yang artinya ada sekitar 5,34% bobot yang tidak dapat dioptimalkan oleh Biro Umum

Analisis Penyebab Keberhasilan / Perencanaan Biro Umum yang sudah baik :

- a) Biro Umum telah Menyusun Renstra Tahun 2017 – 2021 yang telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target jangka menengah dan telah menyajikan IKU secara implisit.

- b) Renstra telah dipublikasikan ke website www.sumbarprov.go.id dan sudah dapat diakses dengan mudah.
- c) Tujuan dan sasaran pada renstra telah berorientasi hasil (outcome), ukuran keberhasilan (indicator) tujuan dan sasaran telah memenuhi kriteria indicator yang baik dan target kinerja telah ditetapkan dengan baik.
- d) Renstra telah selaras dengan RPJMD dan renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
- e) Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) telah dibuat, PK telah menyajikan IKU dan telah selaras dengan RPJMD.
- f) Sasaran pada RKT telah berorientasi hasil, indicator kinerja sasaran dan hasil (outcome) program telah memenuhi kriteria Indikator Kinerja yang Baik dan Target Kinerja pada RKT ditetapkan dengan baik.

Analisis Penyebab Kegagalan / Perencanaan Biro Umum yang masih perlu diperbaiki

- a) Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan dan telah direviu secara berkala, namun belum ada perbaikan yang signifikan.
- b) Telah ada rencana aksi dan realisasinya untuk menentukan target dan dan pencapaiannya atas kinerja yang telah diperjanjikan, namun target yang ditetapkan hanya tahunan sehingga tidak bisa dimonitor pencapaiannya secara periodic. Pimpinan tidak bisa melihat progress kinerja yang terbaru pada setiap program ataupun kegiatan untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dari sebuah program.
- c) Rencana aksi sudah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan namun pemanfaatannya baru

terbatas pada pelaporan / dokumentasi semata tanpa Tindakan nyata.

- d) Rencana Kerja Tahunan sudah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran dan untuk menyusun (mengidentifikasi) kinerja sampai level eselon III dan IV, target kinerja yang diperjanjikan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja.

Alternatif Solusi atau Tindak Lanjut / Rekomendasi yang menjadi perhatian dalam perencanaan :

- a) Target yang ditetapkan pada rencana aksi dibuat bulanan, triwulan, semesteran sehingga bisa dimonitor pencapaiannya secara periodic
- b) Pemanfaatan realisasi rencana aksi tidak hanya sebagai pelaporan tetapi digunakan dalam pengukuran kinerja
- c) Target kinerja yang diperjanjikan sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja

2) Pengukuran Kinerja (bobot 25%) Realisasi Bobot 16,60

Dari hasil evaluasi oleh Inspektorat LKj Biro Umum Tahun 2021 mendapat bobot 16,60%, yang artinya ada sekitar 8,40% bobot yang tidak dapat dioptimalkan oleh Biro Umum.

Analisis Penyebab Keberhasilan / Pengukuran kinerja yang sudah baik :

- a) Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal dan telah menyajikan formulasi pengukuran sehingga setiap indikator jelas cara mengukur keberhasilannya.
- b) Implementasi pengukuran terhadap kinerja sudah cukup memadai terutama rewiu berkala dan pemanfaatan IKU untuk memonitoring pencapaian target kinerja eselon III dan IV sebagai pengukuran capaian kinerja

Analisis Penyebab Kegagalan / Pengukuran Kinerja yang menjadi focus perbaikan

- a) Terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV serta staf (individu) yang sudah dilengkapi dengan sasaran dan indicator kinerja atasannya, namun indicator kinerja tersebut belum sepenuhnya selaras dengan indicator kinerja atasannya.
- b) Belum terdapat SOP mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan.
- c) Hasil rekomendasi monitoring target kinerja tidak ada bukti tidak lanjutnya.
- d) Hasil pengukuran kinerja belum dikaitkan dengan pemberian reward dan punishment
- e) Hasil pengukuran rencana aksi tidak ditindak lanjuti

Alternatif Solusi atau Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan

- a) Indikator kinerja eselon III, IV dan Staf diselaraskan dengan indicator
- b) SOP pengumpulan data kinerja dibuat
- c) Hasil pengukuran kinerja dijadikan sebagai dasar pemberian reward dan punishment
- d) Hasil pengukuran rencana aksi agar ditindaklanjuti

3) Pelaporan Kinerja (bobot 15%) Realisasi Bobot 9,53%

Dari hasil evaluasi oleh Inspektorat LKj Biro Umum Tahun 2021 mendapat bobot 9,53%, yang artinya ada sekitar 5,47% bobot yang tidak dapat dioptimalkan oleh Biro Umum.

Analisis Penyebab Keberhasilan / Pelaporan kinerja yang sudah baik:

- a) Laporan Kinerja telah disusun dan disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dan telah di upload diwebsite, capaian yang disajikan tentang pencapaian IKU masih perlu perbaikan agar
- b) Laporan kinerja telah menyajikan informasi mengenai pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan
- c) Informasi kinerja telah menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi hasil
- d) Laporan kinerja telah menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi.

Analisis Penyebab Kegagalan / Pelaporan Kinerja yang menjadi fokus perbaikan

- a. Laporan kinerja hanya menyajikan perbandingan realisasi dengan target, belum menyajikan perbandingan kinerja tahun berjalan.
- b. Informasi kinerja dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan
- c. Informasi kinerja masih kurang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan

Alternatif Solusi atau Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan

- a. Laporan kinerja seharusnya menyajikan perbandingan kinerja tahun berjalan dengan kinerja tahun sebelumnya dan perbandingan lainnya yaitu realisasi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah
- b. Informasi kinerja harus lebih valid
- c. Informasi kinerja disajikan dalam perbaikan perencanaan.

4) Evaluasi Internal (bobot 10%) Realisasi Bobot 6,06%

Dari hasil evaluasi oleh Inspektorat LKj Biro Umum Tahun 2021 mendapat bobot 6,06%, yang artinya ada sekitar 3,94% bobot yang tidak dapat dioptimalkan oleh Biro Umum.

Analisis Penyebab Keberhasilan / Evaluasi Internal yang sudah baik:

- a) Pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya telah dilaksanakan dengan terdokumentasinya pertemuan-pertemuan yang dilakukan.
- b) Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi dan evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilakukan dan hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

Analisis Penyebab Kegagalan / Evaluasi Internal yang perlu diperbaiki :

- a) Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan secara regular dan belum terdokumentasikan.
- b) Pemantauan rencana aksi baru dilakukan secara semesteran

c) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum seluruhnya ditindaklanjuti.

Alternatif Solusi atau Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan :

- a) Supervisi pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan secara regular dan terdokumentasi
- b) Pemantauan rencana aksi telah dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja sebaiknya dilakukan bulanan / triwulanan.
- c) Agar hasil evaluasi akuntabilitas kinerja seluruhnya ditindaklanjuti secara menyeluruh.

5) Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi (20%) realisasi bobot 14,00

Dari hasil evaluasi oleh Inspektorat LKj Biro Umum Tahun 2021 mendapat bobot 14,00%, yang artinya ada sekitar 6,00% bobot yang tidak dapat dioptimalkan oleh Biro Umum.

Analisis Penyebab Keberhasilan / Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi yang sudah baik :

- a) Target Kinerja Biro Umum secara umum telah tercapai sesuai dengan target yang diperjanjikan, walaupun masih ada yang tidak tercapai 100%
- b) Biro Umum telah membuat inovasi dalam menerapkan manajemen kinerja yang dapat meningkatkan efisiensi kinerja

Analisis Penyebab Kegagalan / Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi yang masih perlu diperbaiki :

- a) Informasi mengenai kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan
- b) Tidak ada penghargaan yang diperoleh biro umum selama 3 tahun terakhir

Alternatif Solusi atau Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan :

- a) Peningkatan capaian kinerja yang ditetapkan sebaiknya bisa melebihi target yang telah ditetapkan
- b) Inovasi manajemen kinerja dengan IKU yang terukur sampai jenjang individu dan diukur secara berkala dan ditindaklanjuti dengan adanya reward dan punishment

- c) Meningkatkan prestasi kerja sehingga mendapatkan penghargaan atau pengakuan dari pihak atau Lembaga nasional.

Analisis Peningkatan/Penurunan

Dalam hal pencapaian target kinerja jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan kinerja biro umum pada indikator nilai evaluasi akuntabilitas kinerja secara umum terdapat peningkatan karena hasil evaluasi inspektorat biro umum mendapat nilai 70,85 dengan target 70,00 keadaan ini disebabkan karena evaluasi akuntabilitas kinerja biro umum adalah sangat baik, akuntabel, berkinerja baik dan memiliki system manajemen kerja yang andal.

Dan jika dibandingkan dari tahun lalu nilai tahun 2020 realisasi 72,86 dengan predikat "Sangat Baik" dan turun nilai di tahun 2021 menjadi 70,85 dengan predikat "Sangat Baik" penyebab penurunan ini adalah tidak ada perbandingan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya serta indikator kinerja yang kurang selaras antara eselon II, III, IV dan Staf.

3. Sasaran Strategis 3 : "Meningkatnya pencapaian Target Retribusi"

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi untuk kinerja tahun 2022 diambil dari Realisasi Pendapatan Biro Umum :

Analisis Penyebab Keberhasilan

Capaian kinerja realisasi penerimaan retribusi Biro Umum mencapai 111,35% dari target 95%. Keberhasilan ini disebabkan karena adanya peningkatan pemakaian kekayaan daerah dalam hal ini retribusi pemungutan pemakaian Istana Bung Hatta dan Mess Bukti Lampu. Peningkatan ini sebagai dampak dicabutnya status pembatasan beraktifitas dalam jumlah besar karena jauh menurunnya angka kasus covid-19

Analisis Penyebab Kegagalan

Secara umum tidak ada hal-hal yang menyebabkan kegagalan, namun ada hal yang perlu ditingkatkan terutama promosi ke kabupaten / kota se Sumatera Barat untuk meningkatkan minat terhadap pemakaian ruangan.

Analisis Peningkatan/Penurunan

Dalam hal pencapaian target kinerja jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan kinerja biro umum pada indikator % realisasi penerimaan retribusi secara umum terdapat peningkatan karena hasil realisasi pendapatan retribusi biro umum mendapat realisasi 111,35% dengan target 95,00% keadaan ini disebabkan karena adanya peningkatan pemakaian kekayaan daerah dalam hal ini retribusi pemungutan pemakaian Istana Bung Hatta dan Mess Bukti Lampu. Peningkatan ini sebagai dampak dicabutnya status pembatasan beraktifitas dalam jumlah besar karena jauh menurunnya angka kasus covid-19.

Dan jika dibandingkan dari tahun lalu tahun 2021 realisasi 204,17% dengan predikat “Sangat Baik” dan turun di tahun 2022 menjadi 111,35 dengan predikat “Sangat Baik” penyebab penurunan ini adalah karena adanya peningkatan target pendapatan retribusi dari Rp.66.000.000 di tahun 2021 menjadi Rp.284.000.000 di tahun 2022

Alternatif Solusi atau Tindak Lanjut

- a) Meningkatkan promosi pendapatan retribusi Biro Umum ke Kabupaten / Kota
- b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, Sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan peningkatan retribusi tersebut.

3. 3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. **Sasaran Strategis 1 : “Meningkatnya Kepuasan Stakeholders di Bidang Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH, Pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Setda”.**

Analisis Capaian Sasaran Strategis 1 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Kepuasan Stakeholders Dibidang Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH, Pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Setda” Tahun 2022 ini mencapai 100,78% termasuk berhasil dengan kategori “Sangat Baik”.

Guna meningkatkan kualitas pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH, pelayanan pimpinan dan pelayanan administrasi keuangan setda diupayakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi melalui kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah .

a) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Menyelenggarakan penyediaan-penyediaan barang dan jasa terkait kunjungan tamu dan rapat koordinasi sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terkendali. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

b) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Menyelenggarakan penyediaan-penyediaan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan kendaraan jabatan, kendaraan jabatan, mebel, peralatan dan mesin lainnya sehingga operasional pelaksanaan kegiatan berjalan lancar. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

c) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Menyelenggarakan penyediaan-penyediaan barang dan jasa guna memenuhi segala kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, sehingga barang milik daerah tersebut dapat dioperasikan secara efektif. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

d) Kegiatan Administrasi Keuangan dan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Menyelenggarakan penyediaan-penyediaan barang dan jasa guna memenuhi segala kebutuhan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pelayanan administrasi keuangan KDH/WKDH. Pelaksanaan Kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

e) Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Menyelenggarakan penyediaan-penyediaan barang dan jasa guna mendukung kebutuhan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Istana Bung Hatta dan Mess Bukit Lampu, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terkendali. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah,

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.

f) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Menyelenggarakan penyediaan-penyediaan barang dan jasa guna memenuhi segala kebutuhan Gaji, honor pengelola keuangan daerah hingga belanja penunjang administrasi keuangan perangkat daerah lainnya. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Hasil Pemeriksaan

Total pagu dana penunjang Sasaran Strategis 1 adalah sebesar **Rp.91.669.745.351** realisasi sebesar **Rp.88.235.839.132** persentase mencapai **96,25%** kategori sangat baik dengan capaian diatas target 95%. Tercapainya target diatas 95% realisasi keuangan lebih disebabkan karena adanya optimalisasi pengadaan barang dan jasa serta tidak lepas dari perencanaan penganggaran yg baik.

TABEL 3.3.4.1

REALISASI ANGGARAN PROGRAM PADA SASARAN STRATEGIS 1

NO.	KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.208.330.399	8.165.431.451	99,48
2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.380.770.962	3.355.616.519	99,26
3.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.975.229.945	9.653.978.008	96,78

4.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5.071.049.601	4.988.235.848	98,37
5.	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	20.499.545.122	20.330.985.547	99,18
6.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.534.819.322	41.741.591.759	93,73
JUMLAH		91.669.745.351	88.235.839.132	95,25

Sumber : Data Realisasi Anggaran Biro Umum 2022

2. Sasaran Strategis 2 : “Terwujudnya Tata Kelola Organisasi”

Analisis Capaian Sasaran Strategis 2 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2 “Terwujudnya Tata Kelola Organisasi” Tahun 2022 ini mencapai 70,85% termasuk berhasil dengan kategori “Sangat Baik”. Keberhasilan ini dapat dicapai melalui berbagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengendalian organisasi secara umum. Guna mendapatkan kendali atau kontrol yang baik diupayakan melalui Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

menyelenggarakan penyediaan-penyediaan barang dan jasa guna memenuhi segala kebutuhan organisasi dan Pimpinan sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan lancar dan terkendali. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

2) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Menyelenggarakan dukungan bagi peningkatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

menyelenggarakan dukungan terhadap peningkatan kapasitas dan disiplin ASN melalui sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Menyelenggarakan penyediaan barang dan jasa kebutuhan kantor melalui sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Menyelenggarakan penyediaan jasa kantor melalui sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.

Menyelenggarakan penyediaan barang dan jasa yang mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui sub kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Total pagu dana penunjang Sasaran Strategis 2 adalah sebesar **Rp.24.470.873.663** dengan realisasi sebesar **Rp.23.623.975.694** persentase realisasi mencapai **96,54%** dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut dilakukan efisiensi penggunaan anggaran dengan cara mengontrol / menyeleksi dengan baik beban biaya jasa serta beberapa langkah penghematan penyediaan kebutuhan barang dan jasa lainnya.

TABEL 3.3.4.2
REALISASI ANGGARAN PROGRAM PADA SASARAN STRATEGIS 2

NO.	KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	559.759.929	553.626.836	98,90
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	383.709.782	376.168.284	98,03
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	673.410.000	655.435.342	97,33
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.208.330.399	8.165.431.451	99,48
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.645.663.553	13.873.313.781	94,73
	JUMLAH	24.470.873.663	23.623.975.694	96,54

Sumber : Data Realisasi Anggaran Biro Umum Tahun 2022

3. Sasaran Strategis 3 : “Meningkatnya pencapaian Target Retribusi”

Capaian kinerja Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi” Tahun 2022 ini mencapai 111,35% termasuk berhasil dengan kategori “Sangat Baik”. Keberhasilan ini dapat dicapai melalui berbagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengendalian organisasi secara umum. Guna mendapatkan kendali atau kontrol yang baik diupayakan melalui Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

1) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Menyelenggarakan penyediaan-penyediaan barang dan jasa yang mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui sub kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.

Total pagu dana penunjang Sasaran Strategis 3 adalah sebesar **Rp.89.592.000** dengan realisasi sebesar **Rp.87.821.850** persentase realisasi mencapai **98,02%** dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut dilakukan efisiensi penggunaan anggaran dengan cara mengontrol / menyeleksi dengan baik beban biaya jasa serta beberapa langkah penghematan penyediaan kebutuhan barang dan jasa lainnya.

TABEL 3.3.4.3
REALISASI ANGGARAN PROGRAM PADA SASARAN STRATEGIS 3

NO.	KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	89.592.000	87.821.850	98,02
	JUMLAH	89.592.000	87.821.850	98,02

Sumber : Data Realisasi Anggaran Biro Umum Tahun 2022

3.4 Realisasi Anggaran

Anggaran yang digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Biro Umum serta kegiatan-kegiatan urusan maupun kegiatan rutin lainnya bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022. Anggaran tersebut mencakup Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, KDH/WKH dan Belanja Operasional KDH/WKDH dengan total pagu sebesar **Rp.48.079.991.973** dan realisasi sebesar **Rp.45.328.916.133** dengan persentase mencapai **94,28%**. Sedangkan untuk Belanja Penunjang Kegiatan Lainnya dengan total pagu sebesar **Rp.59.941.888.642** terealisasi sebesar **Rp.58.453.289.092** persentase mencapai **97,52%**. Sehingga total anggaran belanja Biro Umum TA. 2022 berjumlah **Rp.108.021.880.615** dengan realisasi sebanyak **Rp.103.782.205.225** persentase mencapai **96,08%** secara keseluruhan.

TABEL 3.4.1
TARGET BELANJA BIRO UMUM TA. 2022

NO.	JENIS BELANJA	TARGET BELANJA (Rp.)	PERSENTASE
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, KDH/WKH dan Belanja Operasional KDH/WKDH	48.079.991.973	44,51
2.	Belanja Penunjang Kegiatan Lainnya	59.941.888.642	55,49
	Jumlah	108.021.880.615	100,00

Sumber : DPA Perubahan Biro Umum Tahun 2022

Melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 ini, dianggarkan 1 (satu) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 48 (empat puluh delapan) sub kegiatan guna mendukung pencapaian sasaran dan tujuan strategis Biro Umum seperti yang tertera pada dokumen Perjanjian Kinerja Biro Umum Tahun 2022.

Jumlah Anggaran Program dan Kegiatan beserta Realisasi Keuangannya dapat dilihat pada Tabel 3.4.2 berikut ini :

TABEL 3.4.2
REALISASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
			108.021.880.615	103.782.205.225	96,08
1.	Meningkatnya Kepuasan Stakeholders di Bidang Pelayanan Tamu dan Pimpinan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91.669.745.351	88.235.839.132	95,25
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.208.330.399	8.165.431.451	99,48
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.380.770.962	3.355.616.519	99,26
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.975.229.945	9.653.978.008	96,78
		Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5.071.049.601	4.988.235.848	98,37
		Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	20.499.545.122	20.330.985.547	99,18
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.534.819.322	41.741.591.759	93,73
2.	Terwujudnya Tata Kelola Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	559.759.929	553.626.836	98,90
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	383.709.782	376.168.284	98,03
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	673.410.000	655.435.342	97,33
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.208.330.399	8.165.431.451	99,48
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.645.663.553	13.873.313.781	94,73
3.	Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89.592.000	87.821.850	98,02
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	89.592.000	87.821.850	98,02

Sumber : Data Realisasi Anggaran Biro Umum Tahun 2022

BAB IV

Penutup

LKj Biro Umum Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Biro Umum dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

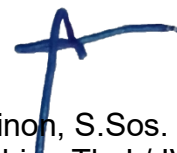
Pada tahun 2022 ini, pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum diselenggarakan dalam rangka pencapaian 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja, yang dengan penuh tantangan tetap dapat terlaksana dengan cukup baik. Berkat Ridho ALLAH Subhanahu wata'ala, seluruh indikator kinerja Biro Umum dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Walaupun demikian, setiap pencapaian perlu dilakukan evaluasi, agar mendapat feedback guna perubahan ke arah yang lebih baik. Selain itu, juga untuk mengetahui lebih dini terhadap hal-hal yang dianggap dapat mengakibatkan tidak tercapainya target, agar dibuatkan inisiatif strategis yang akan mengarahkan tercapainya target.

Dengan disusunnya LKj Biro Umum Tahun 2022 ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pimpinan maupun kepada seluruh pihak (stakeholders) yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum. Selain itu, diharapkan juga adanya feedback atau umpan balik agar hasil (outcomes) yang diharapkan dari setiap program dapat memberikan dampak yang baik bagi stakeholders dan customers Biro Umum.

Selain itu, LKj ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi peningkatan dan pengembangan kinerja organisasi dalam mewujudkan tujuan strategis organisasi sehingga apa yang telah dicita-citakan melalui tujuan Biro Umum "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" dapat diwujudkan.

Kepala Biro Umum,



Syefdinoh, S.Sos. MM.
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19720713 199803 1 002